

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu di lapangan tentang tampilan kerja konselor sekolah/guru pembimbing, yang diangkat kepermukaan melalui hasil-hasil penelitian, maupun yang hanya mendasarkan pada impresi sesaat atau pengamatan sekilas. Isu yang muncul lebih banyak dalam bentuk kecaman negatif tentang tampilan kerja konselor sekolah yang dirasakan kurang dapat memenuhi harapan dari lingkungan kerjanya, dalam hal ini harapan dari kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, serta harapan dari siswa sendiri sebagai pengguna jasa konselor sekolah tersebut.

Berangkat dari isu tersebut, peneliti berusaha melakukan wawancara pendahuluan terhadap beberapa orang siswa dari SMU yang berbeda untuk menggali persepsi serta harapan mereka terhadap konselor sekolah. Data awal memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa belum merasakan adanya manfaat dari kehadiran konselor di sekolahnya sebagai seseorang yang mampu memberikan arahan bagi perkembangan kepribadiannya secara optimal. Sementara ini siswa masih mempersepsi konselor sekolah sebagai petugas sekolah yang fungsinya hanya memberikan hukuman kepada para siswa atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan atau memberikan nasehat-nasehat seperti layaknya guru-guru lain. Menurut siswa selama ini di antara mereka berkembang istilah yang digunakan untuk menyebut konselor sekolah (BP) dengan “Badan Penyiksaan” atau “Badan Peradilan”. Istilah ini muncul menurut mereka karena selama ini konselor sekolah dianggap tugasnya lebih pada mengadili dan menghukum siswa, serta kurang ada kesediaan untuk mendengar keluhan siswa. Konselor sekolah juga dirasakan kurang membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam berhubungan dengan lingkungannya.

Sebenarnya para siswa menyadari betul pentingnya kehadiran konselor sekolah dalam membantu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama masalah yang mereka hadapi dalam menghadapi masa remaja dan masalah di sekolah yang berhubungan dengan kesulitan menghadapi sikap guru yang seringkali dirasakan kurang dapat memahami dirinya. Mereka juga sering merasa sangat kecewa terhadap konselor sekolah yang dianggapnya kurang berupaya untuk mengerti keadaan mereka. Para siswa sangat berharap bahwa konselor sekolah lebih berfungsi sebagai tempat dimana mereka mampu mencurahkan masalah-masalahnya, dan dari hasil pembicaraan yang mereka lakukan dengan konselor sekolah tersebut mereka akan mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan masalahnya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari siswa, peneliti mencoba menilik masalah dari sisi pandang konselor sekolah. Hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan terhadap beberapa orang konselor sekolah, memberikan keterangan yang berbeda tentang isu tersebut. Dari wawancara tersebut terungkap bahwa konselor sekolah merasakan adanya kesulitan dalam upayanya memenuhi harapan-harapan dari lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan konselor sekolah sering dihadapkan pada kondisi kebingungan dalam upayanya untuk memenuhi harapan dari lingkungannya. Kesulitan yang dihadapi oleh konselor sekolah tersebut berangkat dari tidak adanya keselarasan dari harapan-harapan yang diberikan oleh lingkungan, bahkan ada kecenderungan adanya pertentangan atau kesenjangan dari harapan-harapan tersebut. Konselor sekolah juga merasakan adanya beban kerja yang terlalu berat, dimana selain tugasnya sebagai konselor sekolah yang dituntut selalu punya waktu untuk menangani masalah siswa, mereka juga harus menyelesaikan beragam tugas-tugas administratif lain yang sangat menyita waktu dan sering pula menimbulkan masalah tersendiri dalam penyelesaiannya karena banyaknya kendala-kendala. Kesulitan dalam penyelesaian tugas tersebut sering lebih bersumber pada kurangnya kerja sama dari personel sekolah lainnya.

Kondisi kesenjangan harapan lingkungan ini terutama dialami oleh konselor sekolah dalam upaya memenuhi harapan yang datang dari siswa sebagai pengguna jasa dan dari kepala sekolah sebagai penentu kebijakan atau juga dari wali kelas dan guru

mata ajaran sebagai orang yang langsung berhubungan dengan siswa di sekolah tersebut. Para konselor sekolah ini sering dihadapkan pada kondisi untuk menentukan pilihan dalam memenuhi salah satu harapan saja, apakah ia berupaya memenuhi harapan siswa atau harapan dari guru bidang studi/wali kelas. Kondisi inilah yang sering menimbulkan perasaan bingung dan menjadikan dirinya terjebak dalam situasi konflik peran.

Dalam kondisi demikian, konselor sekolah sering merasa bahwa dirinya kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan terkait dalam menjalankan tugasnya. Persepsi konselor sekolah terhadap kurangnya dukungan dari lingkungan sebagai suatu kesatuan kerja, akan dapat membuat konselor sekolah tersebut tidak merasa tenang dan nyaman dalam bekerja, dan kondisi ini dapat menjadikan dirinya mengalami tekanan emosional. Tekanan emosional bisa muncul karena konselor sekolah tersebut merasa bahwa lingkungan kurang memperhatikan dirinya, dan memberikan beban kerja yang melebihi batas kemampuannya, pada gilirannya keadaan ini akan dapat menimbulkan kondisi konflik yang berkepanjangan dan menjadikan keadaan stres. Stres yang dialami oleh seseorang yang tidak terselesaikan akan dapat berpengaruh secara negatif terhadap dirinya, yang dapat pula berakibat lebih jauh pada penurunan tampilan kerjanya.

Melihat uraian di atas tentang isu kekurangtrampilan konselor sekolah dalam menunjukkan tampilan kerja bimbingan dan konseling kepada siswanya, tidak dapat dipandang secara linier dengan hanya berakar pada kekurangmampuan konselor sekolah dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagaimana yang telah ia dapatkan dari pendidikan formal. Kondisi ini bisa juga dipandang dari kurangnya dukungan dari lingkungan kerja yang sebenarnya dapat membantu konselor sekolah dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Maka untuk lebih dapat memahami masalah tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mencari jawaban permasalahan melalui uraian lima tema yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: (1) rasional pentingnya konselor yang profesional di sekolah, (2) penelitian terdahulu tentang isu tampilan kerja konselor sekolah, (3) citra bimbingan dan konseling di sekolah dewasa ini, (4) model bimbingan komprehensif sebagai suatu paradigma pendekatan bimbingan dan konseling yang memandang pentingnya social support (dukungan lingkungan) dalam menunjang

optimalisasi keberhasilan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor sekolah, dan (5) pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling di SMU.

1.1.1 Rasional Pentingnya Konselor Sekolah yang Profesional

Perkembangan zaman banyak menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat, juga menambah kompleksnya masalah yang dialami individu yang berkaitan dengan penyesuaian diri individu tersebut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakatnya yang menyangkut: kompleksnya jenis-jenis pekerjaan, sempitnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan, tingginya persaingan antar individu dalam upaya mencari pekerjaan, serta sejumlah masalah lain yang cukup beragam. Kondisi ini tentunya menuntut individu untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi masalah, seperti masalah penyesuaian diri, masalah perencanaan dan pemilihan pendidikan, masalah perencanaan dan pemilihan pekerjaan, masalah-masalah dalam hubungan sosial, keluarga, keuangan, dan masalah-masalah pribadi lain yang cukup kompleks. Dalam upaya mengatasi masalah-masalahnya, tidak semua individu mempunyai potensi untuk mengatasinya sendiri, terdapat sejumlah individu yang memerlukan bantuan memadai guna menunjang usahanya mengatasi masalah yang dihadapinya itu.

Demikian juga yang terjadi pada siswa, dengan semakin kompleknya keadaan masyarakat, maka tantangan hidup yang akan dihadapi nantinya di masyarakat juga akan semakin berat. Siswa akan sering dihadapkan pada masalah-masalah remaja yang berhubungan dengan pengaruh teman sebaya terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan antar remaja putra dan putri yang terlalu bebas yang dapat berakibat pada masalah hubungan seksual sebelum menikah, masalah-masalah persaingan sekolah yang terlalu ketat sehingga siswa perlu menambah bekal ilmunya melalui Bimbel, masalah komunikasi dengan orang tua yang sering terganggu karena kurangnya saling pengertian diantara mereka, dan masih banyak lagi masalah-masalah sulit yang akan dialami siswa yang membutuhkan penyelesaian yang mandiri.

Melihat kondisi di atas, maka sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan saat ini tidak hanya cukup memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk memenuhi tuntutan terhadap pendidikan dan dunia kerja. Sekolah perlu juga berupaya membantu penyesuaian diri siswa terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, serta menyiapkan siswa secara pribadi dengan mengembangkan kemampuan siswa untuk menolong dirinya sendiri agar ia mampu memecahkan dan mengatasi segala permasalahan yang akan dihadapinya dalam upaya penyesuaian diri terhadap masa remajanya serta upaya penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Kalau kita simak tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 4 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan,

serta kebijakan Link and match yang digariskan oleh mantan Mendikbud Wardiman, memberikan pengertian bahwa proses pendidikan harus membantu siswa atau peserta didik untuk mampu memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan, dan merencanakan masa depan melalui pengambilan serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya.

Pengembangan kemampuan seperti terurai di atas, tampaknya tidak hanya menyangkut aspek akademis, melainkan lebih banyak menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan berpikir dan sistem nilai. Sementara itu di beberapa media masa akhir-akhir ini banyak pakar pendidikan yang memberikan penilaian pada kurikulum 1994 yang dianggap terlalu membebani anak didik di sekolah, karena dinilai materinya terlalu padat sehingga siswa kering dengan aktivitas yang akan dapat membantunya dalam mengembangkan aspek kepribadian sesuai dengan usianya. Hafiz Abbas dalam Seminar Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21 mengungkapkan bahwa:

Dengan kurikulum yang amat padat, membuat tidak ada gairah pada anak didik untuk berimajinasi melahirkan pemikiran dan gagasan baru. Anak didik tidak lagi mempunyai kesempatan menelaah topik-topik bahasan yang diajarkan guru dengan sentuhan keindahan, kedamaian dan kebahagiaan. Karena itu anak didik menjadi mudah lelah, bosan dan tidak dapat menjalani kehidupannya secara wajar dengan menikmati dirinya sebagai anak-anak yang ceria dan bahagia. Kondisi demikian dipandang kontraproduktif dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan perkembangan IPTEK (Republika, 22 September 1998 dalam artikel Kurikulum 1994 Mematikan Gairah dan Imajinasi Siswa).

Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pengembangan kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan menolong diri sendiri untuk menghadapi tantangan lingkungan, maka di dalam proses pendidikan perlu ada strategi upaya yang sistemik dan sistematis untuk membantu peserta didik agar mampu memahami diri, memahami lingkungan, dan merencanakan masa depan melalui pengambilan keputusan yang efektif. Maka untuk dapat mengembangkan kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dapat terjadi seketika melainkan terbentuk melalui suatu proses interaksi dan terkait dengan berbagai faktor, baik faktor kemampuan diri, keluarga, masyarakat, maupun sistem nilai yang dianut. Maka dikatakan bahwa kebutuhan layanan yang diperlukan untuk dapat membantu siswa mencapai tujuan seperti tersebut di atas, tidak hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan yang memberikan sentuhan aspek kognitif saja, namun diperlukan layanan bersifat lebih banyak memberikan layanan yang bersifat pengembangan pribadi.

Strategi layanan yang dirasakan paling sesuai untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah layanan bimbingan dan konseling yang tidak hanya memberikan bantuan pada siswa yang bermasalah, tetapi yang berupaya mengembangkan potensi diri siswa secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Beberapa pakar menggambarkan pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan di sekolah, antara lain Rochman Natawidjaja (1984):

Diantara jenis-jenis layanan bimbingan yang dilaksanakan di sekolah, layanan konseling menduduki posisi yang inti dalam keseluruhan program bimbingan di sekolah. Melalui layanan konseling, siswa mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan secara langsung didalam menanggulangi masalah dan kesulitan yang dihadapinya.

Secara formal layanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan, khususnya persekolahan, telah dilaksanakan sejak berlakunya Kurikulum 1975. Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989 (UU No.2 /1989) dengan perangkat Peraturan Pemerintahnya, khususnya PP No. 28 pasal 25 dan PP No. 29 tahun 1989 pasal 27, pengakuan legal terhadap layanan bimbingan sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik semakin jelas dan eksplisit. Khusus untuk Pendidikan Menengah, seperti tertera pada PP No 29 tahun 1990 pasal 27 ayat 1 dan 2, bahwa:

...bimbingan merupakan upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan, dan bimbingan itu diberikan oleh konselor sekolah.

Dengan telah munculnya perangkat aturan bagi konselor sekolah tersebut, maka di dalam menjalankan fungsinya konselor sekolah dituntut untuk dapat bertindak sebagai seorang profesional, artinya konselor sekolah diharapkan mampu membekali anak didiknya dengan kemampuan memahami kecakapan dan potensi dirinya, agar ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan merencanakan masa depan sesuai dengan cita-citanya dan harapan dari masyarakat di sekitarnya. Oleh karena konselor sekolah diharapkan mampu memenuhi harapan lingkungan kerjanya, dalam hal ini siswa sebagai pengguna jasa dan mitra kerjanya (wali kelas dan guru bidang studi) serta kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolahnya.

Agar dapat memenuhi semua tuntutan yang diberikan padanya, maka konselor sekolah tersebut harus selalu berupaya untuk selalu berusaha meningkatkan dirinya agar ia dapat selalu menyesuaikan diri dengan segala tuntutan yang ada. Dalam usahanya untuk mengembangkan (meng-up grade) diri, maka bantuan dari pihak yang berwenang di sekolah akan sangat berarti, karena upaya ini membutuhkan unsur-unsur penunjang yang cukup banyak, seperti pengadaan bahan bacaan, keikutsertaan dalam seminar atau lokakarya, dan usaha-usaha lain yang sejenis. Untuk itu sangat diperlukan kerja sama yang cukup harmonis antara konselor sekolah tersebut dengan para personel

sekolah lain di lingkungannya, disamping kesiapan diri konselor sekolah tersebut dalam upaya memenuhi tuntutan tugasnya.

1.1.2 Penelitian Terdahulu tentang Isu Tampilan Kerja Konselor Sekolah

Pengalaman peneliti selama menjalankan tugas praktek Bimbingan Konseling di salah satu SMU dan wawancara pendahuluan dengan beberapa orang konselor sekolah dari beberapa SMU yang berbeda, memberikan gambaran bahwa lingkungan mempersepsi konselor sekolah masih belum mampu menunjukkan unjuk kerja yang memadai. Gambaran sementara mengindikasikan adanya beberapa penyebab yang berasal dari dalam diri konselor sekolah tersebut, serta yang berasal dari lingkungan terkait yang kurang menunjang kemampuan unjuk kerja konselor sekolah secara maksimal.

Peneliti merasa tertarik untuk dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, apakah lebih bersumber pada diri konselor sendiri (persepsi terhadap tekanan kerja, dan kemampuan mengatasi tekanan kerja), atau kendala lebih disebabkan oleh faktor di luar dirinya dalam hal ini kurangnya dukungan kerja sama dari lingkungan terkait. Apakah dengan kendala-kendala yang ada tersebut dapat menyebabkan konselor-konselor sekolah merasakan adanya tekanan yang mengganggu rasa aman dalam dirinya dan dapat berakibat pada terganggunya efektivitas kerjanya?

Untuk itu peneliti berusaha mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang mungkin dapat memberikan gambaran sementara mengenai kondisi ini. Hasil kajian yang dilakukan peneliti seperti terinci di bawah ini:

- A. Murad (1992) menyatakan bahwa penampilan unjuk kerja petugas bimbingan dalam melaksanakan wawancara konseling awal, tidak berbeda secara signifikan antara petugas yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dengan petugas yang berlatar belakang non-bimbingan.
- Afif Zamzani (1993), mengidentifikasikan terdapat masalah umum lainnya yang dihadapi konselor sekolah dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal-hal yang menjadi masalah umum dan menghambat pelaksanaan layanan

bimbingan konseling di sekolah adalah: (1) ada kepala sekolah yang kurang menghargai profesi bimbingan konseling, (2) ada guru yang kurang mendukung kegiatan bimbingan, (3) masih kurang kemampuan konselor sekolah, (4) kurang perhatian konselor sekolah terhadap permasalahan yang ada atau yang mungkin ada, (5) kurang pemahaman siswa terhadap manfaat bimbingan, (6) belum ada pengawas khusus bimbingan, (7) kurang adanya sarana dan prasarana bimbingan, (8) kurang partisipasi dan kerja sama orang tua siswa, dan (9) belum optimalnya peran organisasi profesional bimbingan.

- M. Solehuddin (1993), kurikulum jurusan PPB (FIP Ikip Bandung) yang selama ini berlangsung tampak masih sangat kurang memuat hal-hal yang mengarah kepada pembinaan kemampuan praktis, sehingga para lulusannya kurang mampu menampilkan unjuk kerja bimbingan yang benar-benar berbeda dengan mereka yang bukan lulusan BP/PPB.
- Ambo Enre Abdullah (1995), mengungkapkan bahwa kenyataan-kenyataan penampilan profesional yang dapat dipandang sebagai permasalahan bimbingan dan konseling antara lain adalah: (1) kurangnya pengetahuan, ketrampilan, kemauan dan wawasan, (2) belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, (3) tidak bisa menciptakan hubungan sosial, kerja sama, dan suasana harmonis dengan guru mata pelajaran dan staf sekolah lainnya, (4) masih ragu-ragu dalam melaksanakan tugas profesionalnya, (5) administrasi pelaksanaan tugasnya belum lengkap, dan (6) melanggar kode etik.
- Sameon (1996), mengungkap tentang keengganan siswa untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah menerangkan bahwa: siswa merasa takut “diadili” ketika dipanggil ke ruang konseling, sehingga dalam proses bimbingan siswa memasuki proses bimbingan dan konseling dengan kesiapan untuk membela dan mempertahankan dirinya, sehingga ia tidak berkomunikasi secara terbuka. Siswa mengidentifikasi konselor sekolah sebagai staf yang berkaitan dengan struktur otoritas lembaga sekolah yang penuh dengan berbagai peraturan/tata tertib, sehingga sosok konselor sekolah identik dengan hukum dan hukuman.

- Janwar Tambunan (1996), menggambarkan temuannya, antara lain:
 - (*) sebagian besar petugas bimbingan belum memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam melaksanakan layanan konseling. Keterbatasan kemampuan itu mengakibatkan layanan konseling cenderung merupakan kegiatan menginterogasi siswa atas pelanggaran tata tertib/disiplin sekolah yang dilakukannya, atau terbatas pada pemberian nasihat-nasihat secara umum saja;
 - (*) iklim organisasi sekolah yang dirasakan sebagai penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, antara lain kurangnya dukungan kerja sama dari seluruh personel sekolah dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, kurangnya anggaran dan fasilitas yang diberikan untuk dapat menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, serta kurangnya kesempatan yang diberikan kepada petugas bimbingan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi kerja melalui program-program pelatihan.
- Zulfahmy (1997) merinci tentang masalah yang dihadapi oleh konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, ditemukan bahwa konselor sekolah selalu saja mendapatkan informasi tentang perilaku siswa yang negatif dari guru bidang studi dan kepala sekolah. Sehingga siswa yang berperilaku negatif yang datang kepada konselor sekolah sudah ditangani terlebih dahulu oleh guru disiplin atau kepala sekolah, baru setelah itu diserahkan kepada konselor sekolah untuk ditangani/ditindak lanjuti.
- Juntika Nurihsan (1997) menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan siswa dengan layanan bimbingan yang diperolehnya, dimana layanan yang diberikan lebih mengacu pada harapan/tuntutan dari pemberi tugas (sekolah), sehingga layanan yang diberikan lebih bersifat pemberian nasihat.
- Isu tentang ketidak andalan konselor sekolah juga dikemukakan oleh para ahli yang berkepentingan dengan profesi tersebut. Konselor sekolah tidak siap pakai di lapangan (Munandir, 1986, hal. 2), konselor sekolah dikatakan “polisi sekolah” (Prayitno, 1987, hal. 14), kegiatan konselor memberikan “pelajaran bimbingan” (Rochman Natawidjaja, 1989, hal. 8), konselor sekolah sebagai petugas administrasi,

pelaksana koperasi sekolah, pelaksana presensi, dan keranjang masalah (Thohari Musnamar, 1991, hal. 5), guru bimbingan sedang “tidur” (Prayitno, 1991, dalam Marjohan, 1994).

Membaca kenyataan umum sebagaimana terungkap dari hasil-hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh konselor sekolah di lapangan yang diduga akan dapat menghambat optimalisasi layanan konseling di sekolah. Kalau disederhanakan permasalahan yang muncul bisa disebabkan oleh faktor internal dalam hal ini kepribadian konselor, serta faktor eksternal dalam hal ini lingkungan yang terkait dengan tugas pelayanan bimbingan dan konseling.

Lingkungan kerja yang kurang memberikan iklim yang kondusif dalam menunjang kemampuan konselor sekolah untuk melaksanakan tugasnya bahkan ada kecenderungan memberikan tuntutan berlebihan, dapat dipersepsi oleh konselor sekolah tersebut memberikan beban kerja yang diluar batas kemampuannya dan hal ini akan memberikan peluang terhadap munculnya gejala stres.

1.1.3 Citra Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Menurut Cece Rakhmat (1995) kunci keberhasilan dalam program bimbingan di sekolah terletak pada konselor sekolah itu sendiri, yang dalam melaksanakan fungsi dan perannya, ia dituntut untuk dapat memenuhi kompetensi profesional, pribadi, sosial dan spiritual. Ia pun menegaskan bahwa konselor sekolah harus menunjukkan beberapa ciri profesional seperti: memiliki keahlian, memiliki tanggung jawab, mampu menjaga penampilan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya karena layanan bimbingan dan konseling dikategorikan sebagai layanan profesional, maka dalam menjalankan layanannya konselor sekolah tidak bisa melakukan secara setengah-setengah, karena hal ini akan berdampak negatif kepada layanan bimbingan konseling itu sendiri.

Kalau kita melihat pada latar belakang pendidikan konselor, maka melalui pendidikan profesi Bimbingan dan Konseling yang telah diikutinya selama studi, kompetensi profesional konselor sekolah telah berusaha dipersiapkan, sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum BP/PPB. Materi yang diberikan adalah berbagai pengetahuan konsep teori bimbingan dan konseling serta ketrampilan praktek konseling, hal ini dimaksudkan untuk memberi bekal kepada para lulusannya agar mampu menunjukkan kemampuan unjuk kerja konseling di dalam setting sekolah.

Namun dalam operasionalisasi di lapangan masih sering terdengar keluhan tentang konselor sekolah yang dirasakan kurang mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sekalipun pengakuan legal-formal telah diberikan. Masalah utama yang dirasakan adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling yang selama ini dijalankan cenderung lebih didasarkan atas tuntutan formal daripada atas dasar kebutuhan siswa. Akibatnya layanan bimbingan dan konseling lebih merupakan pekerjaan administratif daripada sebagai layanan pengembangan pribadi peserta didik, seperti yang diharapkan dalam pedoman layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tampaknya konselor sekolah mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya, beberapa hambatan sering dihadapi oleh konselor sekolah seperti terungkap dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan.

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yaitu adanya kendala yang berasal dari lingkungan kerja konselor sekolah berupa kurangnya dukungan kerja sama dari personel sekolah lain dalam menunjang pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Secara terinci hal ini berupa : lingkungan yang sering memberi tugas kepada konselor sekolah untuk menindak lanjuti siswa-siswa yang diidentifikasi oleh guru, wali kelas atau kepala sekolah sebagai melanggar disiplin, penempatan konselor sekolah sebagai agen sekolah (guru disiplin) dan kurang dihargainya posisi konselor sekolah yang independen sesuai dengan profesi bimbingan konselingsnya, kurangnya dukungan dari guru bidang studi dan wali kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses bimbingan konseling, kurangnya kesadaran siswa akan manfaat bimbingan dan konseling, sikap negatif siswa

terhadap konselor sekolah, persepsi siswa tentang konselor sekolah sebagai “polisi” atau “hakim” yang bertugas untuk menghukum dan mengadili siswa, kurangnya partisipasi dan kerja sama dari orang tua dan personel sekolah lain, dan beberapa masalah lain.

Disisi lain kendala yang tampak pada pribadi konselor sekolah adalah munculnya kebingungan konselor sekolah tentang tugas dan perannya, karena adanya perbedaan dari harapan peran konselor yang diberikan oleh lingkungan kerja (kepala sekolah, guru bidang studi, wali kelas), dengan harapan peran yang disampaikan oleh siswa. Kondisi demikian menunjukkan adanya konflik peran pada diri konselor sekolah, yang sering membuat mereka masuk dalam situasi yang sulit.

Beberapa ahli perilaku berpendapat bahwa orang yang menghadapi konflik peran akan mengalami tekanan psikologis yang dapat menimbulkan masalah-masalah emosional. Konflik peran merupakan hambatan untuk dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, karena dalam dirinya akan timbul ketegangan emosi yang memerlukan pengalihan energi untuk mengatasinya, energi yang semula diarahkan untuk bekerja akan terbagi sebagian untuk mengatasi konflik tersebut. Konflik peran ini harus dapat diatasi karena akan dapat mengakibatkan ketidak puasan kerja, kemangkiran, dan mengakibatkan orang membutuhkan perawatan tertentu (Muchinsky, 1983).

Persepsi individu terhadap situasi yang menimbulkan kesenjangan, dan reaksinya terhadap keadaan yang menyulitkan tersebut, akan berbeda-beda tergantung pada penilaian akan kemampuan dirinya dalam mengatasi kondisi tekanan tersebut. Gejala umum yang muncul di lapangan adalah bahwa dengan adanya kesenjangan harapan ini cenderung membuat konselor merasa bingung, dan reaksi yang kemudian ditampilkannya dalam upaya melakukan layanan bimbingan dan konseling adalah lebih bersifat menginterogasi atau memberikan nasihat kepada siswa. Kurang tampak adanya upaya untuk memberikan layanan yang sesuai dengan harapan siswa atau menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Juga masih terlihat adanya kondisi bahwa konselor sekolah kurang mencoba menangani siswa secara menyeluruh guna mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa sesuai dengan tujuan bimbingan

dan konseling, yang lebih tampak adalah bahwa konselor sekolah hanya menindak lanjuti siswa-siswa yang bermasalah saja.

Beberapa hasil penelitian menggambarkan kondisi bahwa pendidikan profesi yang diberikan kepada para konselor kurang dapat memberikan hasil yang sesuai harapan, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan unjuk kerja konselor yang berlatar belakang pendidikan bimbingan konseling (BP/PPB) tidak menunjukkan perbedaan dengan konselor sekolah yang berlatar belakang pendidikan non-bimbingan (bukan dari BP/PPB), kondisi ini juga menunjang dugaan sementara peneliti bahwa konselor sekolah belum mampu memanfaatkan kemampuan konseling yang dipunyainya untuk menangani siswa. Hal ini dikarenakan permasalahan yang mereka temui di lapangan yang seringkali menyulitkan dirinya untuk dapat berperan sesuai dengan apa yang seharusnya.

1.1.4 Model Bimbingan Komprehensif Sebagai Salah Satu Model yang Menekankan pada Koordinasi dan Kerja Sama Personel Sekolah dalam Layanan Bimbingan dan Konseling, Sebagai Solusi untuk Mengatasi Keluhan tentang Konselor Sekolah

Berdasarkan pembahasan tentang isu adanya kesenjangan harapan yang muncul dari siswa sebagai pengguna jasa konselor sekolah, dan harapan lingkungan kerja yang terkait dengan konselor sekolah tersebut. Peneliti melihat bahwa lingkungan kerja konselor sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru bidang studi, wali kelas, dan siswa sendiri kurang menyadari bahwa dalam program layanan bimbingan dan konseling mereka semua adalah sebagai suatu kesatuan yang terkait erat dengan keberhasilan program bimbingan dan konseling di sekolah. Mutu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor sekolah sangat tergantung pada kerja sama antara unsur yang terkait dengan program bimbingan dan konseling tersebut.

Sehubungan dengan bahasan tentang mutu bimbingan dan konseling, studi yang dilakukan Sunaryo Kartadinata dkk. (1993) di SMA se-Jawa Barat menunjukkan bahwa mutu bimbingan dan konseling masih perlu ditingkatkan. Aspek program bimbingan,

ketenagaan, prosedur dan teknik, isi bimbingan, serta daya dukungan lingkungan termasuk manajemen, pembinaan profesional, dan sarana-prasarana merupakan aspek-aspek yang masih memerlukan penataan secara sistemik dan sistematis.

Juga penelitian tentang layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan Juntika Nurihsan (1997) pada beberapa SMU Negeri Jabar, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan siswa dengan layanan bimbingan dan konseling yang diperolehnya. Layanan yang diberikan lebih mengacu pada harapan/tuntutan dari pemberi tugas (sekolah), kurang berupaya memenuhi harapan dari siswanya. Sehingga siswa mempersepsi bahwa layanan yang diberikan lebih bersifat pemberian nasihat. Temuannya ini kemudian ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya (1998), yang berupaya merancang model bimbingan komprehensif yang direncanakan untuk peningkatan mutu dan sistem manajemen layanan bimbingan dan konseling di SMU.

Hasil yang diperoleh memberi gambaran bahwa model bimbingan komprehensif yang disarankan masih belum mampu mengoptimalkan sistem manajemen layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Penyebabnya adalah kurang dipersiapkannya secara terpadu mental dan kemampuan personel bimbingan (konselor sekolah, kepala sekolah, guru lain, siswa, orang tua, semua unsur terkait di sekolah) dalam mengembangkan manajemen, materi, dan strategi bimbingan, untuk itu pemasyarakatan model bimbingan komprehensif ini perlu secara intensif diberikan kepada semua personel sekolah, sehingga secara terpadu para personel sekolah tersebut akan mengoptimalisasikan layanan bimbingan terhadap siswa, bersama-sama dengan guru pembimbing.

Model layanan Bimbingan Konseling Komprehensif yang dikembangkan oleh Juntika sebagai tim peneliti dari proyek URGE tersebut melalui upaya adaptasi dan modifikasi terhadap Model Bimbingan Komprehensif (The Comprehensive Guidance Model) dari Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson di Universitas Missouri Columbia (1988), dan Bimbingan Perkembangan dari Donald H. Blocher. Model ini mempunyai tujuan untuk membantu siswa memahami, menerima, mengarahkan, dan mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya seoptimal mungkin, dan membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakatnya; serta membantu siswa untuk meningkatkan ketangguhan pribadinya yang dapat berguna untuk mencegah munculnya masalah yang akan menghambat perkembangan pribadinya, serta membantu siswa untuk merencanakan kehidupan masa depannya yang sesuai dengan tuntutan dunia pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Berdasarkan tujuan dari model bimbingan komprehensif ini, maka pemberian bimbingan kepada siswa tidak hanya cukup dengan merespon masalah siswa melalui layanan responsif, namun berusaha pula mengembangkan seluruh potensi siswa melalui layanan dasar bimbingan dan mengembangkan siswa melalui layanan perencanaan individual.

Anggapan dasar yang melandasi model bimbingan komprehensif ini adalah bahwa program bimbingan yang bertujuan mengembangkan potensi siswa secara optimal merupakan suatu keutuhan yang mencakup berbagai dimensi yang terkait dan dilaksanakan secara terpadu antara personil sekolah, keluarga, dan masyarakat, melalui interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. Berdasarkan pendekatan ini maka orang-orang yang terlibat dengan program bimbingan konseling di sekolah adalah konselor, guru mata pelajaran, administartor/kepala sekolah, orang tua, siswa, anggota masyarakat, dan karyawan sekolah, dimana masing-masing unsur terkait mempunyai tugas sendiri sesuai dengan perannya. Konselor sekolah bertugas memberikan layanan dan mengkoordinasikan program, bekerja sama dengan para guru dan administrator agar program tersebut berhasil.

Maka melalui pemahaman kita pada model bimbingan komprehensif ini, kegiatan bimbingan dan konseling akan sulit mencapai hasil yang optimal apabila unsur terkait kurang memahami akan tugas dan perannya, dan konselor sekolah akan mengalami kesulitan untuk menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan tugas apabila tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan kerjanya. Artinya kelancaran bimbingan dan konseling di sekolah sangat tergantung pada kesadaran dari masing-masing personel untuk ikut serta dalam menjalankan program bimbingan dan konseling, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Berdasarkan bahasan di atas, layanan bimbingan dan konseling memang sangat diperlukan bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Layanan bimbingan dan konseling yang diperlukan oleh siswa adalah layanan yang tidak hanya diberikan atau diadakan untuk merespon siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi layanan bimbingan dan konseling yang diperlukan adalah layanan yang mampu mengembangkan seluruh potensi siswa. Layanan bimbingan komprehensif adalah suatu alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai harapan siswa yaitu mengembangkan optimalisasi kepribadian siswa sesuai tujuan pendidikan nasional kita.

Dalam kurikulum 1994 yang telah sarat dengan materi pelajaran, tidak lagi cukup mempunyai waktu untuk memberikan jam pemberian layanan bimbingan dan konseling di kelas, seperti yang tertera pada kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum '94 tersebut memang secara implisit tercantum bahwa apabila layanan bimbingan dan konseling dirasakan perlu untuk dilaksanakan melalui pemberian materi di kelas, maka hal ini diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dari pimpinan sekolah tersebut. Melihat bahwa siswa sebenarnya mempunyai harapan untuk mendapatkan berbagai kemampuan yang membantu dirinya menghadapi berbagai tuntutan lingkungan, maka pemberian materi bimbingan dan konseling seperti yang ditawarkan oleh model bimbingan komprehensif tampaknya memerlukan suatu pemberian materi yang terprogram secara sistemik dan sistematis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bila pemberian materi layanan bimbingan dan konseling ini menjadi suatu materi yang terprogram, seperti materi pelajaran yang lain, maka sangat diperlukan kesiapan konselor sekolah untuk dapat mengemas materi tersebut sebagai suatu materi yang dapat menarik bagi para siswa. Sementara ini berdasarkan kenyataan di lapangan rasio guru pembimbing yang ada belum dapat memenuhi standar rasio yang ideal, yaitu 1 : 150 yang berarti bila jumlah siswa suatu sekolah menengah adalah 1500 siswa, maka diperlukan 10 orang tenaga guru pembimbing. Karena jumlah rasio ideal ini belum terpenuhi, maka pihak sekolah dalam upayanya memenuhi rasio ideal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah yaitu dengan memanfaatkan guru mata pelajaran yang belum mempunyai jam mengajar di

kelas secara penuh, atau guru mata pelajaran yang karena sesuatu hal materinya dihilangkan (seperti guru PKK, guru ketrampilan, guru bahasa asing, dll.). Dengan adanya kondisi ini timbul pertanyaan baru, apakah para guru mata pelajaran ini telah cukup mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan harapan siswa?

Masalah lain yang dihadapi oleh konselor sekolah adalah adanya kebutuhan sekolah untuk data pribadi siswa. Tugas tersebut selama ini menjadi tanggung jawab guru pembimbing yaitu berupa pengisian buku catatan pribadi siswa. Sebenarnya buku ini bisa diisi oleh siswa sendiri dan tidak perlu memberikan beban kepada guru pembimbing, namun kenyataannya kebanyakan siswa kurang bersedia untuk mengisinya, karena ia belum melihat manfaat dari pengisian buku catatan pribadi tersebut, sehingga apabila ia mengisi akan kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara pihak sekolah merasa sangat membutuhkan data ini untuk memberikan laporan tentang kondisi siswa, maka hal ini sering menjadikan beban pekerjaan tambahan yang menyita banyak waktu konselor sekolah.

Apabila konselor sekolah kurang mempunyai persepsi yang positif terhadap harapan dari lingkungannya, maka ia akan mempersepsi bahwa lingkungan memberikan tuntutan kepada dirinya yang melebihi batas kemampuannya, dan hal ini merupakan suatu kondisi yang rawan terhadap stres. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan terjadi kondisi stres yang bersifat kumulatif dan akan dapat berakibat negatif bagi guru pembimbing tersebut dalam menampilkan kemampuan unjuk kerjanya.

Kondisi lain yang sering ditemui di lapangan adalah bahwa pihak sekolah selalu berusaha untuk mendeteksi siswa yang bermasalah secara dini melalui daftar hadir siswa, tugas ini sering juga dibebankan pada konselor sekolah. Tugas mengecek daftar hadir siswa ini berdampak pada konselor sekolah yang seringkali harus bertugas sebagai guru piket (guru disiplin), hal ini juga merupakan salah satu penyebab yang membuat siswa makin mempersepsi konselor sekolah sebagai polisi sekolah yang tugasnya menghukum siswa. Pada situasi tersebut konflik peran akan semakin dirasakan oleh konselor sekolah, disatu pihak ia ingin mencoba memahami kondisi siswa dengan alasan-alasan yang

dikemukakan, tetapi di pihak lain sebagai guru disiplin ia perlu menanamkan kedisiplinan dengan aturan yang ketat.

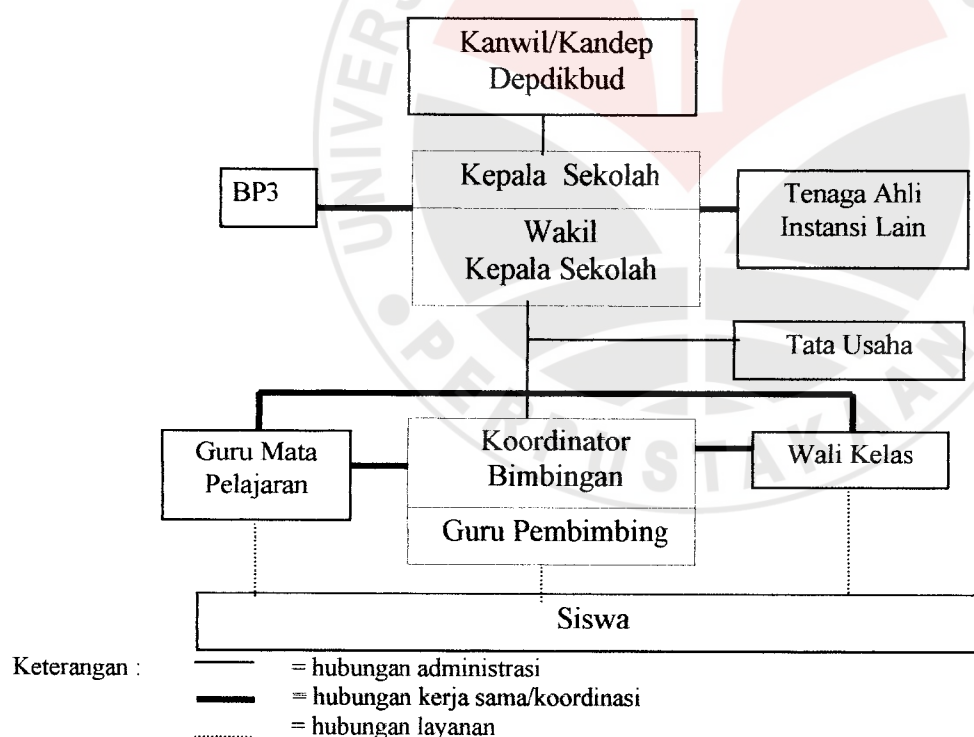
Keadaan lain yang muncul di lapangan adalah dengan semakin baiknya keadaan gisi siswa, maka cukup banyak siswa SMU yang kecerdasannya tergolong baik, yang muncul lewat NEM diatas 40. Kebutuhan layanan konseling untuk siswa-siswa ini berbeda dengan siswa-siswa yang kemampuannya tergolong kurang, siswa-siswa pada kelompok ini mempunyai harapan bahwa konselor sekolah akan mampu memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dialaminya melalui diskusi dengan siswa, bukan berbentuk nasehat yang berangkat dari sudut pandang konselor sekolah itu sendiri. Dengan kondisi ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa konselor sekolah, perlu selalu bebenah diri lewat upaya membekali diri dengan berbagai informasi yang mampu ia gunakan untuk menjawab masalah siswa-siswa tersebut. Sementara itu dengan saratnya tugas yang diberikan pada konselor sekolah, serta kemampuan konselor sekolah untuk memperkaya materi konseling yang terbatas, sering merupakan kendala yang mengganggu konselor sekolah tersebut untuk dapat memenuhi tuntutan lingkungannya.

1.1.5 Pengorganisasian Layanan Bimbingan dan Konseling di SMU

Dalam wawancara pendahuluan terhadap personel sekolah (guru bidang studi, wali kelas) masih cukup banyak personel sekolah yang terkait dengan konselor sekolah yang belum memahami tugas dan perannya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Meskipun kebijakan untuk hal tersebut sebenarnya telah tertera dalam buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bimbingan dan Konseling di SMU tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Menengah Umum. Kekurang pahaman personel sekolah tentang hal ini tampaknya lebih disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka dapatkan, baik dari petugas layanan bimbingan dan konseling (konselor sekolah) itu sendiri, ataupun dari kepala sekolah sebagai koordinator layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Apabila masing-masing personel kurang menunjukkan kerja sama yang optimal, maka layanan bimbingan dan konseling akan kurang dapat terselenggara secara baik, karena sebenarnya dalam pelaksanaan tugasnya konselor sekolah akan dapat berhasil baik apabila mendapatkan bantuan dari personel sekolah lain yang terkait langsung dengan pekerjaannya seperti guru bidang studi dan wali kelas. Dengan adanya kebijakan pada kurikulum 1994 tentang tidak tercantumkannya jam bimbingan dan konseling dalam kurikulum SMU, maka ada atau tidaknya jam tersebut di kelas sangat tergantung pada kebijakan kepala sekolah. Hal ini berakibat pada berkurangnya kesempatan konselor sekolah untuk bertatap muka dengan siswa sebagai pengguna jasa konselor sekolah tersebut. Oleh karenanya peran wali kelas yang menjadi pendamping siswa dalam belajar, serta guru bidang studi yang setiap kali berhubungan secara langsung dengan siswa akan banyak membantu konselor sekolah dalam upaya menjangkau siswa.

Dalam buku petunjuk teknis tersebut, pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling di SMU adalah seperti yang digambarkan dalam bagan 1.1.



Bagan 1.1

Organigram Pelayanan Bimbingan di Sekolah (Depdikbud, 1996:30)

Dalam buku petunjuk tersebut, masing-masing personel sekolah yang berkaitan dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling mempunyai tugas, dengan uraian tugas seperti terurai berikut.

a. Kepala Sekolah

Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah:

- (1) Mengkoordinir seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah.
- (2) Menyediakan dan melengkapi sarana, prasarana, yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling.
- (3) Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling.
- (4) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
- (5) Atas kesepakatan dengan guru pembimbing menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
- (6) Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal catur wulan.
- (7) Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. Surat pernyataan ini dilampiri bukti fisik pelaksanaan tugas (rencana dan persiapan pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut).
- (8) Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.
- (9) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa, bagi kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling.

b. Wakil Kepala Sekolah

Wakil kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam hal:

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah.

- (2) Pelaksanaan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
- (3) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa, bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling.

c. Koordinator Guru Pembimbing

- (1) Mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam:
 - (a) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling
 - (b) Menyusun program
 - (c) Melaksanakan program
 - (d) Mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling,
 - (e) Menilai program
 - (f) Mengadakan tindak lanjut
- (2) Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana.
- (3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada kepala sekolah.

d. Guru Pembimbing

- (1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling.
- (2) Merencanakan program bimbingan dan konseling.
- (3) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.
- (4) Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya minimal sebanyak 150 siswa. Apabila diperlukan, karena jumlah guru pembimbing kurang mencukupi dibanding dengan jumlah siswa yang ada, seorang guru pembimbing dapat menangani lebih dari 150 orang siswa. Dengan menangani 150 orang siswa secara intensif dan menyeluruh, berarti guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang guru, yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu;

- (5) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan.
- (6) Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan.
- (7) Menganalisis hasil penilaian.
- (8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian.
- (9) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
- (10) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

e. Staf Admisitrasi

- (1) Membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
- (2) Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling.
- (3) Membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling.

f. Guru Mata Pelajaran

- (1) Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa.
- (2) Bekerjasama dengan guru pembimbing mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan (observasi).
- (3) Mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing.
- (4) Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan (program perbaikan dan program pengayaan).
- (5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing.
- (6) Ikut serta dalam program layanan bimbingan (misalnya konferensi kasus).
- (7) Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan.

g. Wali Kelas

- (1) Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan.
- (3) Memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh pelayanan bimbingan dari guru pembimbing.
- (4) Ikut serta dalam konferensi kasus.
- (5) Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus.

Membaca uraian tugas dari masing-masing personel sekolah yang terkait dengan tugas guru pembimbing/konselor sekolah, maka dapat dikatakan bahwa kelancaran bimbingan dan konseling di sekolah sangat tergantung pada kesadaran dari masing-masing personel untuk ikut serta dalam menjalankan program bimbingan dan konseling, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing seperti yang telah diuraikan di atas. Apabila masing-masing personel kurang menunjukkan kerja sama yang optimal, maka layanan bimbingan dan konseling akan kurang dapat terselenggara secara baik. Kerja sama sebagai mana yang dijelaskan di atas akan lebih lancar, apabila kepala sekolah memahami benar peranan bimbingan dan konseling di sekolah.

Melihat bahwa sebenarnya telah ada aturan yang dikeluarkan oleh Depdikbud untuk mengatur tugas dan wewenang dari personel sekolah, maka bila hal ini dilaksanakan dengan baik oleh semua personel sekolah, diharapkan keluhan dari konselor sekolah seperti yang muncul sekarang akan dapat teratasi, Namun pada kenyataannya keluhan tersebut tetap muncul di lapangan, artinya para personel sekolah belum memahami kedudukan mereka dalam program layanan bimbingan dan konseling, oleh karenanya peneliti ingin mendapatkan data yang lebih akurat tentang sejauh mana dukungan kerjasama yang telah diberikan oleh lingkungan kerja kepada konselor sekolah/guru pembimbing dalam menunjang tampilan kerjanya.

Berkaitan dengan mutu bimbingan, Schmidt (dalam Dedi Supriadi, 1996) melaporkan hasil penelitiannya bahwa konselor yang bermutu cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap diri dan orang lain, berfungsi penuh, mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai penilaian yang tepat terhadap dunia di sekitarnya, dan mampu menggunakan penilaiannya itu dalam menciptakan hubungan yang bersifat membantu. Dari penelitian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dukungan/kerja sama dari unsur terkait yang diberikan bisa saja diasumsikan kurang terwujud, bukan karena memang kurang adanya dukungan, namun persepsi konselor sekolah yang memaknakan bahwa lingkungan kerjanya kurang memberi dukungan kerja sama.

Dalam kondisi ini berarti tidak semua petugas bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai masalah dengan kemampuan unjuk kerja bimbingan dan konseling. Mereka-mereka yang mempersepsi dirinya cukup memperoleh dukungan sosial yang memadai dari lingkungan kerja yang terkait, akan lebih mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan kerjanya, karena mereka mempersepsi lingkungan sebagai suatu hal yang mendukung dirinya dan menjadikan ia lebih tegar didalam menghadapi situasi lingkungan kerja yang dapat memunculkan kondisi stres.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi konselor sekolah, khususnya mengenai persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya. Apakah keluhan yang muncul tentang kurangnya kemampuan unjuk kerja konselor sekolah dalam menjalankan praktek konseling ini merupakan reaksi dari tekanan/stres yang dihadapinya sehubungan dengan kurangnya dukungan dari lingkungan kerjanya? Sejauhmana faktor kepribadian konselor sekolah, dalam hal ini persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya, mempengaruhi munculnya kondisi stres? Apakah strategi penanggulangan stres (coping stress) turut berpengaruh terhadap munculnya keluhan yang diakibatkan oleh adanya stres kerja tersebut? Apakah terdapat hubungan antara dukungan dari lingkungan, dan strategi penanggulangan stres, terhadap munculnya gejala stres?

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Uraian terdahulu tentang model bimbingan komprehensif menggambarkan bahwa dukungan sosial/kerja sama antar personil sekolah yang sehat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan terhadap keberhasilan konselor sekolah dalam menunjukkan tampilan kerja yang diharapkan sesuai dengan kualifikasi dirinya sebagai seorang konselor sekolah menurut model bimbingan komprehensif.

Berdasarkan pandangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengidentifikasi masalah tampilan kerja konselor sekolah dalam melaksanakan tugasnya melalui model bimbingan komprehensif, dengan berusaha mengkaji aspek-aspek yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan unjuk kerjanya. Dalam hal ini terutama masalah yang berkaitan dengan persepsi konselor sekolah tentang kerja sama antara personil sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya, serta strategi yang digunakan konselor dalam mengatasi permasalahan yang menekan dirinya dalam upaya melakukan layanan bimbingan dan konseling.

Seperti telah diuraikan pada latar belakang penelitian bahwa ketrampilan profesional petugas bimbingan dan konseling merupakan kunci terhadap keberhasilan proses layanan bimbingan dan konseling, dan keberhasilan dalam konseling lebih terletak pada kualitas kepribadian seorang konselor daripada penguasaan teknik tertentu, meskipun bukan berarti penguasaan teknik konselor sekolah tidak diperhatikan. Isu yang muncul di lapangan yang menggambarkan bahwa konselor sekolah masih belum mampu menunjukkan kemampuan unjuk kerja konseling yang memadai dan mendukung terhadap pencapaian optimalisasi tugasnya merupakan suatu tantangan bagi peneliti untuk mengkaji variabel-variabel yang diperkirakan turut mempengaruhi kondisi ini.

Diduga bahwa lingkungan kerja konselor sekolah (kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi) yang kurang memberikan dukungan kerja sama akan dapat menyebabkan konselor sekolah mempersepsi situasi lingkungan sebagai kurang mendukung dirinya dalam menjalankan pekerjaannya, dan keadaan ini akan dapat menjadi suatu kondisi yang mengancam dirinya serta menjadikan dirinya tidak berdaya, dan kurang mempunyai kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan yang dihadapinya,

masalah

dan dapat pula berakibat pada menurunnya tingkat toleransi konselor sekolah tersebut terhadap tekanan kerja, yang pada gilirannya dapat pula memunculkan gejala stres yang mungkin akan berpengaruh pada menurunnya optimalisasi tampilan unjuk kerja konselingnya.

Berdasarkan studi terdahulu dapat diidentifikasi bahwa masih banyak personil di lingkungan kerja konselor sekolah yang kurang memahami perannya sebagai unsur terkait yang perlu mendukung pelaksanaan tugas konselor sekolah dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada para siswa. Adanya tuntutan dari kepala sekolah pada petugas bimbingan konseling untuk menjadi “agen sekolah” dalam menghukum siswa yang bermasalah, dan persepsi siswa tentang konselor sekolah sebagai “polisi”, “hakim” atau “sipir” sekolah, serta saratnya tugas administratif yang diberikan oleh pihak sekolah yang membebani konselor sekolah lebih dari kemampuannya, atau guru bidang studi yang karena kurangnya pekerjaan terpaksa menduduki jabatan sebagai konselor sekolah, dapat diprediksikan menjadikan tekanan yang secara kumulatif akan dapat menjadikan konselor sekolah tersebut mengalami stres dan berpengaruh pada munculnya gejala stres yang dapat berakibat pada menurunnya tampilan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang faktor kepribadian, yaitu pertama tentang bagaimana persepsi konselor sekolah terhadap dukungan lingkungan kerjanya, apakah konselor sekolah mempersepsi lingkungan kerjanya cukup memberikan dukungan sosial yang memadai yang dapat memberi rasa aman pada dirinya dalam menunjang optimalisasi pencapaian tugasnya. Ataukah terdapat kecenderungan bahwa konselor sekolah mempersepsi bahwa lingkungan kerjanya kurang memberikan dukungan sosial seperti yang diharapkan, bahkan terdapat kecenderungan memberikan tuntutan-tuntutan yang melebihi batas kemampuan konselor sekolah tersebut untuk dapat memenuhi tuntutan tugas yang diberikan padanya, dan menjadikan dirinya menjadi merasa terancam oleh tuntutan lingkungan tersebut.

Telaah berikutnya adalah melihat bagaimana strategi penanggulangan stres/coping stress yang dimiliki oleh konselor sekolah, apakah ia cukup mempunyai kemampuan untuk menanggulangi stres yang cukup memadai untuk mengatasi masalah yang ada dalam dirinya. Dari dua permasalahan tersebut peneliti juga akan mengidentifikasi apakah konselor sekolah yang merasakan tekanan tersebut menunjukkan kondisi stres yang ditunjukkan oleh munculnya gejala stres yang dapat mengganggu tampilan kerjanya, yang muncul dalam keluhan-keluhan fisik, emosi, mental, spiritual dan relasi sosial? Ingin dilihat pula bagaimana kaitan antara dukungan dari lingkungan kerja terhadap strategi konselor dalam menanggulangi tekanan yang dialaminya di pekerjaan, serta munculnya gejala stres dalam dirinya.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konselor sekolah mempersepsi dukungan dari lingkungan kerja yang terkait dengan tugas konselor sekolah tersebut, apakah ia mempersepsi dirinya cukup mendapatkan dukungan sosial atau kurang mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya?
2. Bagaimana strategi penanggulangan tekanan yang dipunyai oleh konselor sekolah (coping stress)? Apakah ia cukup mampu menanggulangi tekanan yang ada dengan strategi penanggulangan yang dimilikinya?
3. Apakah ada kecenderungan munculnya gejala stres pada konselor sekolah tersebut yang dapat mengganggu tampilan kerjanya?
4. Apakah ada hubungan antara persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan strategi konselor sekolah tersebut dalam menanggulangi stres kerja?
5. Apakah ada hubungan antara persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan munculnya gejala stres?
6. Apakah ada hubungan antara strategi konselor sekolah dalam menanggulangi stres kerja dengan munculnya gejala stres?

7. Apakah ada hubungan kausal antara persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dan strategi konselor dalam menanggulangi stres terhadap munculnya gejala stres kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan penyebab utama dari kekurangmampuan konselor sekolah dalam menunjukkan tampilan kerja konseling. Dengan memahami dukungan sosial yang diterima oleh konselor sekolah dari lingkungan kerjanya, serta kepribadian konselor sekolah dalam hal ini persepsinya terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya serta strategi penanggulangan tekanan kerja yang dipunyainya. Dengan meneliti unsur kepribadian konselor sekolah akan lebih dapat dipahami dinamika munculnya isu yang ada di lapangan tentang kekurangmampuan konselor sekolah untuk memenuhi harapan lingkungannya. Hasil yang diperoleh diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada:

1. Pihak penentu Kebijakan Kurikulum Perguruan Tinggi dalam:
 - merumuskan kurikulum yang sesuai untuk Petugas Bimbingan dan Konseling yang akan bertugas di sekolah, terutama dalam pembekalan materi yang berhubungan dengan peningkatan fungsi kepribadian, dalam hal ini kemampuan menanggulangi tekanan dari lingkungan kerjanya. Dengan harapan agar setelah selesai menempuh studinya, mereka akan mampu menunjukkan tampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan profesional yang diharapkan oleh pengguna jasa;
 - menyeleksi para calon petugas bimbingan dan konseling. Agar dalam seleksi tersebut tidak hanya mengandalkan pada seleksi akademis, tetapi juga mendasarkan diri pada seleksi psikologis terutama tentang persyaratan unsur pribadi sebagai calon petugas bimbingan dan konseling, dalam hal mempersepsi diri dan mempersepsi lingkungan, serta faktor kerentanan terhadap stres dan kemampuan dalam mengatasi stres.

2. Bagi Pemegang Kebijakan di sekolah

- Agar dapat lebih memahami tugas konselor sekolah sebagai orang yang diharapkan dapat membimbing siswa dalam mengoptimalkan perkembangan kepribadiannya. Oleh karenanya diharapkan lingkungan tidak terlalu membebani konselor sekolah dengan tuntutan-tuntutan tugas administratif dan fungsi sebagai agen sekolah yang akan dapat menjadikan dirinya stres yang disebabkan oleh konflik antar peran yang harus dimainkannya, sebagai petugas sekolah atau sebagai konselor sekolah. Pihak penentu kebijakan sesuai dengan perannya diharapkan lebih mencoba menempatkan diri sebagai mitra kerja konselor sekolah yang selalu berusaha untuk memberikan dukungan pada konselor sekolah tersebut sehingga ia merasa aman dan mampu bekerja dengan baik.
 - Dalam menempatkan guru bidang studi yang ditugaskan sebagai konselor sekolah, tidak hanya mendasarkan pada pemenuhan jumlah jam mengajar yang dibutuhkan, tetapi melihat pada kepribadian guru tersebut, apakah ia cukup mempunyai minat untuk melaksanakan tugas sebagai konselor sekolah? Apakah pihak sekolah cukup mempunyai kebijakan (sarana dan fasilitas) untuk memberikan pengkayaan materi pada petugas konseling yang baru tersebut. Artinya karena guru bidang studi tersebut belum mempunyai latar belakang materi bimbingan, maka perlu adanya kesiapan diri guru tersebut untuk menjadi konselor sekolah dengan pemberian bekal pengetahuan yang minimal harus dipunyai oleh konselor sekolah, agar mereka tidak mudah merasa terancam oleh tuntutan perannya sebagai konselor sekolah.
- ## 3. Bagi konselor sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan emosional yang dihadapinya, agar tidak menjadikan munculnya stres yang berpengaruh pada tampilan kerjanya, maka ia perlu selalu meningkatkan diri dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan tentang hal tersebut, lewat diskusi dengan teman sejawat.

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan masalah penelitian maka dapat divisualisasikan hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam bagan 1.2 sebagai berikut:



Bagan 1.2

Kerangka Penelitian

Dari bagan tentang asumsi hubungan antar variabel penelitian yang diungkapkan, maka peneliti dapat menggambarkan suatu hipotesis umum sebagai berikut:

Kinerja konselor sekolah dapat terganggu oleh persepsinya akan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya. Dukungan sosial dari lingkungan kerja dapat berupa dukungan emosi seperti perhatian yang diberikan oleh lingkungan, dapat pula berbentuk dukungan yang konkrit/dukungan instrumental seperti pemberian bantuan keuangan, peralatan, atau yang lainnya, atau dapat pula berbentuk dukungan informasi yang berupa pemberian nasehat, saran atau umpan balik yang diharapkan, dapat pula berupa dukungan penghargaan yang terwujud dalam penghargaan atas prestasi kerja, atau menciptakan perasaan bahwa dirinya berguna. Hal lain yang juga dapat mengganggu kinerja konselor sekolah adalah kurangnya kemampuan konselor sekolah dalam mengatur strategi untuk

menanggulangi tekanan yang datang dari lingkungan kerjanya. Strategi yang dapat digunakan konselor sekolah untuk menanggulangi tekanan kerja dapat berbentuk suatu strategi untuk menghadapi masalah-masalah yang ditemuinya di lingkungan secara langsung dengan kekuatan dan kemampuan penanggulangan masalah yang dimilikinya, atau mencoba lebih berusaha untuk meredusir gejala emosi yang muncul akibat tekanan yang dialaminya.

Oleh karenanya gangguan kinerja konselor sekolah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai munculnya gejala stres yang dihayati konselor sekolah dapat menghambat dirinya dalam bekerja, sebagai akibat dari persepsi konselor sekolah tersebut terhadap dukungan sosial yang dinilai lemah, serta disebabkan juga oleh kurangnya kemampuan konselor sekolah tersebut dalam menanggulangi tekanan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan suatu hipotesis umum bahwa: Munculnya gejala stres pada konselor sekolah dapat diakibatkan oleh:

1. Persepsinya yang rendah/kurang terhadap dukungan sosial yang diterima dari lingkungannya.
2. Kurangnya kemampuan untuk mengatur strategi penanggulangan tekanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di lingkungan kerjanya.

Dari ungkapan tersebut di atas dapat digambarkan suatu hubungan kausal bahwa: munculnya gejala stres pada konselor sekolah mendapatkan sumbangan yang cukup berarti dari persepsinya akan dukungan sosial dari lingkungan kerja dan kemampuannya dalam mengatur strategi penanggulangan tekanan. Dalam kalimat yang lebih operasional, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah:

Hipotesis Penelitian

Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara persepsi konselor sekolah terhadap dukungan sosial dari lingkungan kerjanya, dan strategi penanggulangan tekanan yang biasa digunakan konselor sekolah tersebut, dengan munculnya gejala stres yang diramalkan dapat mengganggu tampilan kerjanya.

Untuk dapat menguji hipotesis tersebut di atas, maka secara statistika perlu diuji hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: P_{yx_1} = P_{yx_2} = 0$$

$$H_1: \text{sekurang - kurangnya ada sebuah } P_{yx_i} \neq 0$$

dengan :

y = munculnya gejala stres

x_1 = persepsi akan dukungan sosial dari lingkungan

x_2 = strategi penanggulangan stres

Dari hipotesis penelitian tersebut diatas, dapat diturunkan enam sub hipotesis sebagaimana tercantum di bawah ini:

Sub Hipotesis 1

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi konselor sekolah akan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan strategi yang digunakan konselor sekolah dalam menanggulangi tekanan/coping stress.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{x_1x_2} = 0$$

$$H_1: P_{x_1x_2} \neq 0$$

Sub Hipotesis 2

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi konselor sekolah akan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan munculnya gejala stres.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{yx_1} = 0$$

$$H_1: P_{yx_1} \neq 0$$

Sub Hipotesis 3

Terdapat hubungan yang signifikan antara strategi yang digunakan konselor sekolah dalam menanggulangi tekanan/coping stress dengan munculnya gejala stres.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{yx_2} = 0$$

$$H_1: P_{yx_2} \neq 0$$

Sub Hipotesis 4

Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara 4 aspek yang ada dalam persepsi konselor sekolah akan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan strategi yang digunakan konselor sekolah dalam menanggulangi tekanan/coping stress secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{x_2x_{11}} = P_{x_2x_{12}} = P_{x_2x_{13}} = P_{x_2x_{14}} = 0$$

$$H_1: \text{sekurang - kurangnya ada sebuah } P_{x_2x_{1i}} \neq 0$$

dengan

x_{11} = persepsi akan dukungan emosi dari lingkungan

x_{12} = persepsi akan dukungan informasi dari lingkungan

x_{13} = persepsi akan dukungan instrumental dari lingkungan

x_{14} = persepsi akan dukungan penghargaan dari lingkungan

Sub Hipotesis 5

Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara 4 aspek yang ada dalam persepsi konselor sekolah akan dukungan sosial dari lingkungan kerjanya dengan munculnya gejala stres secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{yx_{11}} = P_{yx_{12}} = P_{yx_{13}} = P_{yx_{14}} = 0$$

$$H_1: \text{sekurang - kurangnya ada sebuah } P_{yx_{1i}} \neq 0$$

Sub Hipotesis 6

Terdapat hubungan kausal yang signifikan antara aspek-aspek yang ada dalam strategi yang digunakan konselor sekolah dalam menanggulangi tekanan/coping stress dengan munculnya gejala stres secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Uji statistiknya adalah:

$$H_0: P_{yx_{21}} = P_{yx_{22}} = 0$$

$$H_1: \text{sekurang - kurangnya ada sebuah } P_{yx_{2i}} \neq 0$$

dengan

x_{21} = penanggulangan stres yang berpusat pada penyelesaian masalah

x_{22} = penanggulangan stres yang berpusat pada peredaan emosi

